

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR PERATURAN PERUNDAGAN</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Metode Penelitian.....	10
1.3.1 Tipe penelitian.....	10
1.3.2 Pendekatan masalah.....	11
1.3.3 Sumber bahan hukum.....	12
<b>BAB II SANKSI YANG DAPAT DITERAPKAN TERHADAP PELAKU PELANGGARAN PARKIR DI <i>DROP ZONE</i> AREA MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU</b> .....	14
2.1 Pelanggaran Parkir di <i>Drop Zone Area</i> Bandara.....	14
2.2 Peraturan Perundang-Undangan yang Diterapkan Pada Pelanggar Parkir.....	19
2.2.1 U.U. No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana .....	19

2.2.2	U.U. No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	19
2.2.3	M.o.U tentang Kerjasama antara Pihak Keamanan Bandara dengan Pihak Tentara Nasional Indonesia Tahun 2006 terkait Keputusan PT. Angkasa Pura I.....	21
2.3	Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelanggar Rambu Larangan Parkir.....	22
2.3.1	Teori Pertanggung Jawaban Secara Pidana.....	22
2.3.2	Pertanggung Jawaban Terhadap Pelanggar Rambu Larangan Parkir.....	25
<b>BAB III</b>	<b>PIHAK YANG BERWENANG MELAKUKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI YANG MELAKUKAN PELANGGARAN RAMBU RAMBU LALU LINTAS DI <i>DROP ZONE AREA</i></b> .....	<b>28</b>
3.1	Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana.....	28
3.2	Wewenang Penegak Hukum dalam Pelanggaran Hukum Di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	29
3.2.1	Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	32
3.2.2	Kejaksaan Republik Indonesia.....	35
3.2.3	Kekuasaan Kehakiman.....	37
3.2.4	Tentara Nasional Indonesia.....	38
3.2.5	Satuan Pengamanan.....	42
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>47</b>
4.1	Kesimpulan.....	47
4.2	Saran.....	48

## DAFTAR BACAAN

## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia, dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian;
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
8. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
9. SKEP Dirjen Perhubungan Udara No. 100/XI/1985;
10. SKEP Menteri Perhubungan No. 54 tahun 2004;
11. M.o.U tentang Kerjasama Antara Pihak Keamanan Bandara dengan Pihak Tentara Nasional Indonesia Tahun 2006 terkait Keputusan PT. Angkasa Pura I.